

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No.137 | Tahun XXXVI | April - Juni 2019

Lipsus
Menuju
Sentralisasi
Organisasi

Hedy Lopian:
SDM Menjadi Tuan
Rumah di Semua
Industri

Ke Sektor Mana
Kredit Mengalir?



**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Membaca Arah Kredit Perbankan

Berbicara fungsi intermediasi perbankan tentunya tak akan lepas dari dana pihak ketiga dan kredit. Teori dasar perbankan mengatakan bahwa bank memiliki fungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tadi dalam bentuk kredit. Banyak faktor yang menentukan berjalan tidaknya peran intermediasi perbankan ini, antara lain kondisi politik-ekonomi, baik domestik maupun global.

Seperti diketahui, pada 2019 ini, atau tepatnya 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pesta rakyat, yaitu pemilihan umum (pemilu) serentak, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislatif, baik DPR, DPRD maupun DPD. Ini adalah pertama kali pemilu serentak diselenggarakan pascareformasi.

Menilik perjalanan ekonomi dan politik di Tanah Air, pemilu memang tak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi dalam negeri. Pemilu diidentikkan dengan tingginya angka inflasi. Hukum ini berlaku sejak pemilu pertama yang diselenggarakan setelah kemerdekaan, yakni pada 1955 hingga Pemilu 2019. Namun, pada Pemilu 2019 ada tren positif. Inflasi pada masa-masa menjelang pemilu tidak terlalu bergejolak, meski 2019 merupakan pemilu serentak.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berjalan sukses menggambarkan bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik di Indonesia. Dapat dimaklumi bila ada kekhawatiran pelaku bisnis, termasuk bisnis perbankan, pada masa-masa menjelang Pemilu 2019. Dalam menjalankan bisnis, situasi politik menjadi pertimbangan untuk memitigasi risiko. Pelaku bisnis biasanya akan mengambil keputusan bisnis dengan mantap begitu pesta demokrasi usai dan sudah dapat dipastikan siapa pemegang tampuk pemerintahan, dalam hal ini untuk periode 2019-2024.

Bisnis perbankan juga tak lepas dari arah bisnis sektor riil. Ketika pelaku bisnis sektor riil belum berani mengeksekusi bisnisnya, perbankan akan menahan kucuran kreditnya. Merujuk pada pemerintahan periode 2014-2019, infrastruktur menjadi sektor yang mendapat perhatian. Masih banyak program infrastruktur yang belum selesai pada periode tersebut dan dapat dipastikan proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

Sektor infrastruktur tentunya memberikan *multiplier effect* pada sektor-sektor lainnya. Di sinilah perbankan harus jeli. Di samping infrastruktur yang bisa menjadi target bisnis, sektor apa lagi yang kira-kira layak dikucuri kredit. Penyaluran kredit yang sesuai dengan kebutuhan akan menumbuhkan perekonomian yang seimbang.

Situasi sulit yang dihadapi sektor riil dan perbankan bukan hanya terkait dengan Pemilu 2019. Melemahnya perekonomian global serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga memengaruhi perekonomian Indonesia. Belum lagi perubahan teknologi yang begitu cepat dan tentunya berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Mengikuti gaya hidup yang berubah, pola bisnis pun berubah. Perbankan harus mampu menyikapinya dengan cermat. ■



Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Ke Sektor Mana Kredit Mengalir? 3

Kredit perbankan pada triwulan pertama 2019 tumbuh *double digit*. Setelah perhelatan pemilu akbar, kredit diprediksi mengalir deras. Sektor mana saja yang akan menjadi andalan perbankan dalam mengucurkan kredit?



Peta Kredit Pasca-Pilpres 6

Kredit Investasi Paling Stabil 8

Penyaluran kredit perbankan melambat di beberapa sektor, yang dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung *wait and see*. Kredit investasi di sektor konstruksi menjadi sektor kredit yang pertumbuhannya paling stabil.

Bank Harus Punya Ekosistem 9

Profil

Hedy Lopian,
Direktur SDM PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anggota Bidang Governance, Pendidikan dan Pengembangan SDM Perbanas

SDM Menjadi Tuan Rumah di Semua Industri 10

Perubahan yang begitu cepat harus bisa direspons dengan cepat pula oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Tujuannya supaya Indonesia memiliki SDM yang kompetitif dan bisa bersaing dengan SDM negara lain.



Liputan Khusus

Rapat Pleno Nasional dan Rapat Umum Anggota Perbanas 2019 13

Menuju Sentralisasi Organisasi 14

Di tengah melambatnya perekonomian dalam beberapa tahun terakhir, Perbanas mengemas banyak kegiatan demi meningkatkan kinerja industri perbankan dan perekonomian nasional. Ke depan akan lebih banyak kegiatan Perbanas Daerah yang bersinergi dan melibatkan pengurus Perbanas Pusat.



Wacana

Arbitrase untuk Selesaikan Sengketa 16

Regulasi

Tak Sekadar Berpromosi 18

OJK mewajibkan iklan yang dibuat LJK memenuhi empat kriteria, yaitu akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Belum ada sanksi bagi LJK yang iklannya belum memenuhi empat kriteria tersebut. Ke depan akan ada aturan dan sanksi yang dituangkan dalam sebuah regulasi.



Aktualita

Membenahi Penerapan AE01 20

Sekilas Berita

Sosialisasi Penerapan AE01 22

Perbanas Sumut Bagikan Bingkisan Lebaran 23

Menebar Benih Ikan di Danau Toba 24

Seminar "Hukum Kepailitan" Perbanas Jateng 24

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih



Ke Sektor Mana Kredit Mengalir?

Kredit perbankan pada triwulan pertama 2019 tumbuh *double digit*. Setelah perhelatan pemilu akbar, kredit diprediksi mengalir deras. Sektor mana saja yang akan menjadi andalan perbankan dalam mengucurkan kredit?

Puncak tahun politik 2019 sudah berlalu. Pada April 2019 masyarakat Indonesia sudah memberikan hak politiknya, baik dalam pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Selama ini banyak pelaku bisnis yang *wait and see*, menanti kepastian setelah pesta demokrasi itu. Pasalnya, lumrah bila arah ekonomi ditentukan oleh kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin terpilih.

Pada 27 Juni 2019 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pasangan Prabowo-Sandi. Dengan begitu, Joko Widodo yang kali ini berpasangan dengan K.H. Ma'ruf

Amin akan melenggang ke Istana Negara dan memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Terpilih kembali sebagai presiden, arah kebijakan Jokowi diprediksi tak banyak berubah. Jokowi akan tetap gencar membangun infrastruktur dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti yang digaungkan pada masa kampanye.

Dengan begitu, aliran kredit perbankan ke sektor konstruksi diprediksi akan tetap mengalir deras. Mengacu pada kondisi saat ini, menurut Aviliani, ekonom senior INDEF, pelaku bisnis kemungkinan akan menunggu hasil setelah bulan Juni. Publik ingin memastikan program pemerintah tahun ini, meski sudah ada dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kalau kita lihat beberapa tahun ini, BUMN (badan usaha milik negara) lebih banyak mendominasi proyek-proyek infrastruktur. Investor dan pelaku bisnis tentu akan melihat apakah mereka juga bisa ikut serta dalam proyek-proyek tersebut,” ujarnya.

Kemampuan BUMN-BUMN karya dalam menyerap dana dari perbankan juga akan menjadi perhatian. Proyek infrastruktur bisa terus dilanjutkan bila BUMN-BUMN yang mendominasi proyek tersebut punya kemampuan dari sisi finansial. Kalau tidak, bisa terjadi stagnasi. Di lain sisi, Aviliani menilai, aliran kredit ke sektor di luar infrastruktur (konstruksi) juga belum terlalu kelihatan.

Menurut Aviliani, bank-bank masih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Perbankan masih cenderung melihat sektor atau proyek mana yang memiliki jaminan pemerintah. Tujuannya, tentu saja untuk meminimalisasi risiko kredit yang tahun ini masih cukup tinggi.

“Bank-bank juga akan melihat ke mana fokus pemerintah. Sekarang, misalnya kita *'kan* mau meningkatkan ekspor, fokus pada beberapa hal yang memacu ekspor, kita juga ingin menggarap sektor pariwisata. Bank tentu akan mengikuti ke mana fokus pemerintah. Bank juga tidak bisa kasih kredit sembarangan karena mereka pasti melihat risiko kredit masih tinggi,” papar Aviliani.

Tantangan bagi dunia perbankan bukan hanya soal memacu kredit. Saat ini likuiditas juga menjadi perhatian. Rencana pemerintah mengeluarkan obligasi yang cukup besar, yang sekitar Rp200 triliun per tahun, akan menyebabkan perpindahan dana dari bank ke pemerintah. Ini pada akhirnya akan mendorong sektor riil berjalan.

Tahun ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor infrastruktur pada 2019 mencapai Rp415 triliun, naik Rp4,6 triliun ketimbang tahun sebelumnya. Banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mendorong pertumbuhan kredit perbankan. PT Bank Mandiri Tbk, contohnya. Selama triwulan pertama

2019 saja bank pelat merah ini sudah menyalurkan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp177,8 triliun. Angka itu tumbuh 29,5% secara tahunan.

Bank-bank BUMN lain juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid di sektor infrastruktur. Bank BTN contohnya, per Maret 2019 sudah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp30 triliun, meningkat 30% ketimbang periode sama tahun lalu.

Berkah pembangunan infrastruktur bagi kredit perbankan tak hanya dinikmati oleh bank pelat merah. Bank-bank swasta pun menjadikan sektor ini sebagai target. Seperti diungkapkan Paulus Sutisna, Presiden Direktur Bank DBS Indonesia. Paulus mengatakan, penyaluran kredit Bank DBS Indonesia ke sektor infrastruktur akan terus dilakukan dan secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Karena itu, DBS Indonesia banyak menjalin kerja sama dengan BUMN-BUMN yang bergerak di sektor pembangunan infrastruktur. Selain itu, kredit Bank DBS Indonesia banyak mengalir ke sektor pertanian dan perkebunan.

Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad Kusna Permana, juga mengatakan hal senada. Menurutnya, pasca-pilpres aliran kredit masih akan didominasi sektor infrastruktur. Apalagi, mengingat Jokowi yang—bila tak ada perubahan besar—akan kembali menjabat sebagai presiden untuk lima tahun ke depan. Di lain sisi, penyaluran kredit ke sektor perdagangan risikonya akan sedikit meningkat lantaran perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tak kunjung usai.

Hal serupa diungkapkan Yuwono Waluyo, Direktur Bisnis Bank Mega Syariah. Ia berpendapat, penyebaran kredit pasca-pilpres memang tak akan lepas dari sektor infrastruktur. Masih banyak proyek infrastruktur pemerintah yang butuh pendanaan. Namun, sektor-sektor lain juga diproyeksi akan tumbuh positif. Sebut saja, manufaktur, perumahan, dan perdagangan. Bersama sektor infrastruktur, sektor-sektor tersebut akan menjadi andalan perbankan dalam menyalurkan kredit. Aliran kredit yang menyebar ke berbagai sektor juga akan membuat

pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih merata pada masa mendatang.

Pembiayaan sektor infrastruktur juga menjadi salah satu pokok bisnis The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFG) Jakarta Branch. Daisuke Ejima, *Executive Officer & General Manager* MUFG Jakarta Branch, mengatakan, pihaknya sangat mendukung proyek infrastruktur di Indonesia. Ia memproyeksikan kredit ke sektor ini akan tetap berlanjut. Saat ini MUFG Jakarta Branch sudah terlibat dalam pembiayaan sejumlah infrastruktur di Indonesia.

Sementara, bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia (BCA), per April 2019 mencatatkan kenaikan penyaluran kredit ke sektor konstruksi sekitar 30% secara tahunan, yakni menjadi Rp15,7 triliun. Bank yang dipimpin Jahja Setiaatmadja sebagai presiden direktur ini memprediksi pertumbuhan kredit di sektor ini masih akan terus berlanjut.

Laju pertumbuhan kredit infrastruktur sendiri akan sangat bergantung pada progres pembangunan proyek-proyek infrastruktur sepanjang tahun 2019. Dari 25 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah ditetapkan lewat Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih banyak yang sedang berlangsung dan masih butuh pembiayaan.

Sebaran Aliran Kredit Perbankan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), realisasi penyaluran kredit perbankan kepada pihak ketiga bukan bank per Maret 2019 mencapai Rp5.291,23 triliun atau meningkat 11,55% secara tahunan dari tahun sebelumnya Rp4.743,24 triliun. Laju positif pertumbuhan kredit juga diimbangi dengan kualitas kredit yang kian membaik. Rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) terjaga di level 2,52% atau sedikit membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,75%.

Pertumbuhan kredit paling kencang dicatatkan sektor pertambangan dan penggalian yang meningkat 31,50% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp137,75 triliun per Maret 2019. Setelah mencatatkan pertumbuhan minus

10,07% pada 2017, kredit ke sektor ini bangkit pada 2018 dengan mencatatkan peningkatan 21,39%. Hal ini seiring dengan membaiknya harga komoditas tambang.

Laju kencang kredit ke sektor pertambangan dan penggalian diikuti sektor konstruksi. Per Maret 2019 kredit ke sektor ini tumbuh 27,11% (yoy) dari Rp254,71 triliun menjadi Rp323,78 triliun. Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah memang gencar membangun berbagai proyek infrastruktur. Imbasnya, kucuran kredit ke sektor ini pun terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan, sejak 2015 hingga sekarang, kredit ke sektor konstruksi selalu mencatatkan pertumbuhan di atas 20% tiap tahunnya.

Sektor jasa pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan tinggi, yakni sebesar 24,57% dari Rp10,17 triliun menjadi Rp12,66 triliun. Selanjutnya, ada penyaluran kredit ke sektor listrik, gas, dan air yang mengalami peningkatan 21,15% secara tahunan, dari Rp154,24 triliun menjadi Rp186,86 triliun.

Dari sisi jumlah, tiga sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor perdagangan besar dan eceran (Rp972,70 triliun), sektor industri pengolahan (Rp868,89 triliun), serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (Rp354,08 triliun).

Banyak kalangan meyakini laju pertumbuhan kredit perbankan pasca-pemilu akan lebih kencang. Sektor konstruksi masih akan menjadi penggerak pertumbuhan kredit seiring dengan masih banyaknya proyek infrastruktur yang butuh pendanaan.

Kredit dan NPL Bank Umum Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp Miliar)

No.	Sektor	2016	▲(%)	2017	▲(%)	2018	▲(%)	Maret 2019	▲(%)
1	Perdagangan Besar dan Eceran	841.384	6,17	885.462	5,24	975.995	10,22	972.700	9,81
	NPL	35.789	28,06	36.083	0,82	35.285	-2,21	36.750	-0,85
2	Industri Pengolahan	781.765	2,86	824.111	5,42	899.088	9,10	868.891	9,53
	NPL	26.924	41,88	22.287	-17,22	22.274	-0,06	24.519	3,99
3	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	283.827	11,32	317.373	11,82	354.878	11,82	354.080	10,79
	NPL	6.286	29,53	4.332	-31,08	4.672	7,85	4.736	13,25
4	Konstruksi	214.757	24,18	258.931	20,57	316.097	22,08	323.777	27,11
	NPL	8.279	18,19	9.491	14,64	9.919	4,51	11.889	-0,70
5	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	209.999	13,66	221.922	5,68	248.218	11,85	253.836	12,56
	NPL	5.470	13,56	5.473	0,05	4.606	-15,84	4.628	-6,35
6	Perantara Keuangan	193.946	17,77	214.182	10,43	244.486	14,15	232.258	9,82
	NPL	2.415	129,56	1.640	-32,09	2.863	74,57	2.799	43,17
7	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	171.795	-3,24	182.628	6,31	217.323	19,00	213.971	11,38
	NPL	8.303	21,83	6.836	-17,67	5.825	-14,79	5.028	-25,00
8	Listrik, Gas dan Air	135.461	36,21	146.133	7,88	170.190	16,46	186.861	21,15
	NPL	2.218	-3,10	1.573	-29,08	2.259	43,61	1.928	-2,82
9	Pertambangan dan Penggalian	126.335	-6,61	113.615	-10,07	137.912	21,39	137.750	31,50
	NPL	9.043	62,00	7.019	-22,38	6.423	-8,49	5.977	-9,05
10	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman	93.390	8,77	97.886	4,81	99.751	1,91	100.369	3,08
	NPL	2.533	28,77	4.239	67,35	5.516	30,13	6.140	14,19
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	58.707	1,24	72.365	23,26	79.914	10,43	81.271	14,93
	NPL	1.775	-18,39	1.828	2,99	1.474	-19,37	1.859	-11,52
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	14.702	13,85	21.822	48,43	25.068	14,87	26.006	18,31
	NPL	4	-63,64	3	-25,00	3	0,00	6	-14,29
13	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.966	-21,04	19.092	12,53	22.698	18,89	23.117	16,76
	NPL	134	-14,65	318	137,31	381	19,81	352	2,92
14	Jasa Pendidikan	8.553	5,22	10.104	18,13	12.322	21,95	12.664	24,57
	NPL	127	-9,29	128	0,79	100	-21,88	140	44,33
15	Perikanan	9.479	7,19	11.273	18,93	12.137	7,66	12.343	16,02
	NPL	242	-7,63	302	24,79	221	-26,82	839	227,73
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.644	-2,36	2.744	3,78	2.715	-1,06	2.734	1,15
	NPL	68	25,93	57	-16,18	59	3,51	70	-4,11
17	Kegiatan yang belum jelas batasannya	10.611	-11,28	2.752	-74,06	2.257	-17,99	1.593	-54,33
	NPL	73	-69,58	157	115,07	282	79,62	214	10,88
18	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	231	110,00	156	-32,47	173	10,90	172	13,16
	NPL	31	1.450,00	14	-54,84	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha *)	1.202.645	8,76	1.335.393	11,04	1.473.659	10,35	1.486.839	8,95
	NPL	18.420	11,06	21.141	14,77	22.651	7,14	25.398	10,22
Total Kredit		4.377.197	7,87	4.737.944	8,24	5.294.881	11,75	5.291.232	11,55
Total NPL		128.134	26,95	122.921	-4,07	124.813	1,54	133.272	2,16
NPL (%)		2,93		2,59		2,36		2,52	

Keterangan:

- *) : terdiri atas kredit rumah tangga dan bukan lapangan usaha lainnya;

- NPL : non performing loan;

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

- ▲ : pertumbuhan (%);

- disusun berdasarkan total kredit per Maret 2019.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), sektor konstruksi menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan kedua 2019. Posisi April 2019 kredit perbankan tercatat tumbuh 11% (yoy) menjadi Rp5.339,20 triliun.

Kredit ke sektor konstruksi yang menjadi penopang utama mengalami pertumbuhan 21% menjadi Rp327,2 triliun per April 2019. Jika diperinci berdasarkan jenis kreditnya, kredit

investasi (KI) di sektor konstruksi naik paling tinggi, yakni 44,9% (yoy). Menurut BI, kencangnya laju pertumbuhan KI di sektor konstruksi terutama didorong oleh subsektor bangunan jalan tol di wilayah Banten dan Jawa Barat pada triwulan kedua 2019. Adapun, proyek jalan tol yang tengah berjalan saat ini antara lain Tol Kunciran-Serpong, Jakarta-Cikampek Elevated, dan Terbanggi Besar-Kayu Agung. ■

Peta Kredit Pasca-Pilpres 2019

Sebagai *agent of development*, rencana bisnis bank tentu tak lepas dari arah program pembangunan pemerintah. Namun, bank juga memiliki fokus bisnis yang disesuaikan dengan target *market*-nya. Bagaimana pelaku industri perbankan melihat peta kredit pasca-Pilpres 2019?

Pada 30 Juni 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kebijakan akan segera disusun oleh pemerintahan baru ini. Arah kebijakan tentunya merujuk pada kondisi perekonomian global. Lantas, bagaimana pelaku industri perbankan menyusun strategi bisnis pasca-Pilpres 2019?

Seperti diketahui, sektor infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Jokowi selama 2014-2019. Ini bisa menjadi acuan pelaku industri perbankan dalam menyusun strategi bisnis beberapa tahun ke depan. Bisnis perbankan tentunya harus beriringan dengan program pembangunan pemerintah.

Namun, harus tetap disesuaikan dengan kemampuan dan target pasarnya.

Pelaku bisnis perbankan memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penyaluran kredit setelah Pilpres 2019. Sebagian bankir melihat bahwa peta kredit pasca-Pilpres 2019 tidak berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya, yakni masih terkonsentrasi di sektor infrastruktur. Namun, beberapa bankir menilai bahwa ada keunggulan di beberapa sektor lainnya sehingga layak juga mendapat kucuran kredit.

Di lain sisi, perbankan tak bisa menghindari era digital. Bagaimana para bankir melihat era revolusi industri 4.0 di sektor perbankan? Berikut ini petikannya.

Panji Irawan, Direktur Keuangan Bank Mandiri

Setelah pelaksanaan Pilpres 2019, peta kredit Bank Mandiri terpusat di dua sektor, yakni *fast moving consumer good* dan *health care*. Bank Mandiri masih melihat pemetaan kredit di dua sektor utama tadi sebagai hal penting, mengingat nasabah Bank Mandiri masih didominasi perorangan atau ritel. *Fast moving consumer good* dan *health care* inilah yang akan meng-generate transaksi kredit Bank Mandiri. Sektor konstruksi dan perumahan juga menjadi perhatian Bank Mandiri.

Demi mempermudah pelayanan terhadap nasabah, termasuk pelayanan kredit, Panji menyatakan bahwa Bank Mandiri telah memperbesar *capital expenditure* untuk teknologi informasi (TI). Nilainya meningkat dari Rp1,2 triliun pada 2018 menjadi Rp2,4 triliun pada 2019. Perluasan teknologi besar-besaran telah dilakukan Bank Mandiri untuk memperkuat aplikasi dan jaringan TI, seperti membuat *chief information security officer*, memperkuat jaringan *back* dan *middle office*, ditambah dengan penggunaan *artificial intelligence* dalam bentuk *chat with robot*.



Yuwono Waluyo, Direktur Bisnis Bank Mega Syariah

Yuwono Waluyo mengatakan bahwa pemetaan kredit setelah pelaksanaan pilpres tak akan terlepas dari sektor infrastruktur. Mengingat, sektor infrastruktur masih akan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

Namun, Yuwono menambahkan, sektor-sektor seperti manufaktur, perumahan, dan perdagangan juga bisa menjadi andalan jika ingin melihat keseimbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Keseimbangan ini jugalah yang terus dilakukan Bank Mega Syariah melalui pembiayaannya kepada nasabah.

Terkait dengan digitalisasi, Bank Mega Syariah terus berusaha mengembangkan teknologinya. Yuwono menyatakan bahwa bank yang tergabung dalam grup besar CT Corpora ini akan terus bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi *online* agar lebih *fitting* dengan *customer* atau nasabah. Salah satu alasannya adalah untuk integrasi *big data* dari seluruh *customer* dan nasabah yang merupakan karakteristik era industri 4.0.



Vera Eve Lim,
Direktur BCA

Menurut Vera Eve Lim, peta kredit setelah pilpres tak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa Bank Central Asia (BCA) memiliki konsentrasi kredit yang merata di setiap sektor, mulai dari sektor usaha yang mencakup korporasi, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga kredit konsumen.

Terkait dengan era revolusi industri 4.0, BCA yang terkenal sebagai salah satu bank dengan nasabah terbanyak di Indonesia, sudah menjadi pelopor *e-banking* sejak lama. Yang terbaru, BCA meluncurkan fitur



BCA Keyboard. BCA Keyboard memungkinkan nasabah BCA untuk melakukan transaksi *m-banking* sambil *chatting* di WhatsApp sehingga pengguna *mobile banking* BCA tidak perlu lagi melakukan buka-tutup aplikasi *m-banking* BCA ketika sedang menggunakan WhatsApp.

Selain itu, melalui fitur OneKlik pada *m-banking* BCA, BCA mempermudah transaksi nasabah di situs belanja *online* (*e-commerce*) dan pengisian ulang saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

Paulus Sutisna,
Presiden Direktur Bank DBS Indonesia

Bagi Bank DBS Indonesia, pemetaan kredit terfokus pada lima sektor, yakni infrastruktur, *auto sector*, *chemical*, farmasi, dan *consumer*. Paulus menyatakan bahwa pihaknya memahami fokus pemerintahan Jokowi yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Karena itu, Bank DBS Indonesia banyak bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur. Dukungan yang diberikan Bank DBS Indonesia terhadap perusahaan BUMN secara tak langsung berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, Bank DBS Indonesia banyak mengucurkan kredit ke sektor pertanian melalui dukungannya kepada *commodity pool operator* (CPO) di seluruh Indonesia, seperti pengadaan beras. Upaya ini juga merupakan salah satu komitmen Bank DBS Indonesia dalam membantu melengkapi

Bank DBS Indonesia banyak mengucurkan kredit ke sektor pertanian melalui dukungannya kepada commodity pool operator (CPO) di seluruh Indonesia, seperti pengadaan beras.



kebutuhan komoditas pangan di Indonesia.

Sebagai bank yang belum lama ini menerima penghargaan "The Best Global Digital Bank", Bank DBS Indonesia melalui digibank-nya telah menjadi *the big supporter* yang mendorong penggunaan teknologi untuk bidang perbankan.

Achmad Kusna Permana,
Direktur Utama Bank Muamalat

Achmad Kusna Permana melihat pemetaan kredit setelah pilpres masih akan didominasi sektor infrastruktur, mengingat pemerintahan Jokowi masih akan fokus di sektor tersebut. Ia juga menambahkan bahwa fokus penyaluran kredit untuk sektor bisnis atau perdagangan kemungkinan memasuki masa kurang aman akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tak menentu, perbankan dituntut untuk memasang target realistis dalam mengejar pertumbuhan.

Dalam hal teknologi, Bank Muamalat juga tak mau ketinggalan. Pada 2018 Bank Muamalat menggelar pelatihan terhadap pengurus 3.000 lebih masjid dalam rangka

Pada 2018 Bank Muamalat menggelar pelatihan terhadap pengurus 3.000 lebih masjid dalam rangka penggunaan aplikasi Smart Masjid.

penggunaan aplikasi Smart Masjid. Masih pada tahun yang sama, Bank Muamalat meraih penghargaan dari TRAS N CO untuk kategori aplikasi *mobile banking* terbaik bank syariah. Bank Muamalat juga melakukan studi banding ke dua perusahaan *start up*, yakni Elevenia dan Kumparan, untuk bertukar ilmu. Bukan hanya di bidang *information technology* (IT), melainkan juga di bidang budaya dan etos kerja *start up* digital. Hal ini tentunya diperlukan agar dunia perbankan bisa berubah dan beradaptasi pada era industri 4.0. ■



Kredit Investasi Paling Stabil

Penyaluran kredit perbankan melambat di beberapa sektor, yang dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung *wait and see*. Kredit investasi di sektor konstruksi menjadi sektor kredit yang pertumbuhannya paling stabil.

Memasuki 2019, penyaluran kredit perbankan tidak bisa lepas dari dinamika politik. Pada kuartal kedua 2019 kredit perbankan tercatat tumbuh *double digit*, meski terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) per April 2019, pertumbuhan kredit bank mencapai 11,05% secara *year on year (yoy)*.

Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti, menyatakan, untuk 2019 laju kredit infrastruktur tak sekencang 2017-2018. Kendati demikian, pertumbuhan kredit tahun ini akan ditopang oleh investasi dan konsumsi.

Menurut Destry, pada semester pertama 2019 penyaluran kredit tak akan kencang, khususnya untuk kredit investasi. Hal ini dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung *wait and see*, memantau perkembangan politik Tanah Air. Menurutnya, saat ini pengusaha masih menunggu kepastian presiden Indonesia terpilih. Sebab, itu akan memengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan.

“Minat investasi itu ada, tapi masih belum optimal karena dalam situasi pilpres. Lihat 2014 lalu, hal-hal yang sifatnya investasi itu stagnan sebab masih mau lihat siapa presidennya dan apa kebijakannya, fokus di sektor apa,” katanya.

Menurut Destry, secara keseluruhan penyaluran kredit baru akan pesat pada semester kedua 2019, usai pemilu rampung. Sebab, kepastian pemimpin dan kebijakannya baru akan terlihat jelas.

Data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) menyebutkan sektor konstruksi masih menjadi sektor yang menopang pertumbuhan kredit di kuartal kedua 2019. Total kredit di sektor konstruksi naik 21% (*yoy*) menjadi Rp327,2 triliun per Maret 2019 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp258,5 triliun.

Per April 2019, kredit konstruksi pada jenis kredit investasi tumbuh paling kencang dibandingkan dengan seluruh sektor kredit, yakni mencapai 44% secara tahunan. Berdasarkan catatan BI, pertumbuhan kredit investasi pada sektor konstruksi di kuartal kedua 2019 didorong oleh subsektor bangunan jalan tol di wilayah Banten dan Jawa Barat.



Kegiatan di sebuah pabrik; *wait and see*

Dari segi pertumbuhan kredit berdasarkan penggunaannya, kredit investasi menjadi sektor kredit yang mengalami pertumbuhan paling stabil dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan dengan sektor yang lain. Akan tetapi, secara portofolio, kredit investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Secara keseluruhan pertumbuhan kredit tergolong stabil, meskipun hingga akhir 2019 OJK memprediksi pertumbuhannya akan melambat dibandingkan dengan 2018. Selain situasi dalam negeri yang diwarnai dengan pemilu, memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi penyebab melambatnya kredit perbankan di Indonesia.

Ketua OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan, pertumbuhan kredit pada 2019 berada di kisaran 9% hingga 11%. Prediksi tersebut merupakan revisi dari prediksi sebelumnya yang sebesar 10% hingga 12%. “Jadi, walaupun turun itu akan terkena batas atasnya. Sekarang saja masih dua digit. Pertumbuhan kredit di sekitar 11%,” kata Wimboh.

Wimboh menambahkan, terdapat beberapa faktor yang membuat pihaknya memangkas target tersebut, salah satunya ialah masih memanasnya perang dagang yang membuat bank-bank merevisi dan menurunkan rencana bisnis bank (RBB) miliknya. “Ada beberapa bank yang tertunda (kredit). Faktornya beragam. Ada juga karena imbas perang dagang,” tambah Wimboh. ■

Bank Harus Punya Ekosistem

Pilpres 2019 berdampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya perbankan. Bagaimana peta kredit perbankan pasca-Pilpres 2019? Akankah aliran dana ke sektor infrastruktur secepat beberapa tahun belakangan?

Memasuki tahun politik 2019, industri perbankan diperkirakan masih akan berhati-hati dalam mengucurkan kredit. Sektor riil yang menjadi partner perbankan pun masih melakukan *wait and see* sampai roda pemerintahan berjalan normal, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Saat ini perbankan masih dibayangi isu-isu seperti ketatnya likuiditas. Pada 2018 pertumbuhan kredit perbankan sedikit *ngebut* mencapai 13%. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan dana. Pada periode ini dana perbankan hanya tumbuh sekitar 8%. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir industri perbankan mendapatkan tekanan dari industri keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (*fintech*) dan pasar modal.

Bagaimana peta kredit perbankan pasca-Pilpres 2019? Aviliani, pengamat ekonomi INDEF, memaparkannya kepada *Probank*, beberapa waktu lalu. Petikannya:

Bagaimana kondisi kredit perbankan pasca-Pilpres 2019?

Melihat situasi saat ini, kemungkinan orang akan melihat pasca-Juni (setelah pelaksanaan pemilu). Meskipun, kredit tidak akan langsung naik karena publik atau investor masih akan menunggu program pemerintah tahun ini.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI), per triwulan kedua 2019 kredit investasi di bidang konstruksi masih mendominasi total kredit perbankan. Bagaimana trennya sepanjang 2019?

Perlu diperhatikan bahwa rata-rata kredit yang disalurkan bank BUMN (badan usaha milik negara) untuk infrastruktur sudah cukup tinggi. Ini menjadi dilema. Di satu sisi, infrastruktur masih akan dilanjutkan, tapi dari mana BUMN karya ini bisa mendapatkan dana. Itu harus ada solusi. Karena, kalau tidak, akan terjadi stagnasi.

Lalu, apakah kredit di luar infrastruktur sudah berjalan?

Belum terlihat. Sektor yang mulai berjalan adalah barang mentah dan transportasi laut yang mulai tumbuh dari sisi kredit.

Mengapa kredit di luar infrastruktur masih tersendat?

Saya melihat bank masih hati-hati dalam menyalurkan

kredit. Mereka masih melihat sektor mana yang masih ada jaminan dari pemerintah dan yang masih aman karena mereka juga melihat risiko kredit tahun ini masih cukup tinggi.

Bagaimana agar keduanya bisa berjalan?

Pemerintah harus fokus. Misalnya, karena saat ini pemerintah mau meningkatkan ekspor, maka fokus pada sektor yang mendorong peningkatan ekspor. Begitu pula dengan sektor wisata. Dengan demikian, bank bisa turut menyalurkan kredit ke sektor yang

menjadi fokus pemerintah.

Selain itu, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kredit, tapi juga likuiditas. Pemerintah tahun ini akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar, sekitar Rp200 triliun per tahun. Dengan penerbitan obligasi oleh pemerintah yang lebih mahal dengan pajak yang lebih murah, akan ada perpindahan dana dari bank ke pemerintah yang akhirnya mendorong sektor riil sehingga bisa berjalan.

Ke depan, apa pekerjaan rumah industri perbankan dalam menghadapi likuiditas?

Bank kalau diibaratkan hamburger, posisinya itu di tengah, dijepit oleh *fintech* (*financial technology*) di bawah dan dijepit pasar modal di atas. Saat ini pembiayaan korporasi dari bank banyak yang lunas dan selanjutnya diambil pasar modal. Di satu sisi, segmen mikro banyak diambil oleh *fintech* dan bank hanya sebagai tempat uang.

Oleh karena itu, bank harus mulai berpikir, bagaimana bekerja sama dengan lembaga keuangan nonbank (LKNB) dan mau tidak mau bank tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendapatan dari kredit. Bank harus mempunyai ekosistem. Saat ini, dari 114 bank, yang punya ekosistem baru 30 bank. ■



Hedy Lopian,
Direktur SDM PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anggota Bidang
Governance, Pendidikan dan Pengembangan SDM Perbanas

SDM Menjadi Tuan Rumah di Semua Industri

Perubahan yang begitu cepat harus bisa ditanggapi dengan cepat pula oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Tujuannya, supaya Indonesia memiliki SDM yang kompetitif dan bisa bersaing dengan SDM negara lain.

Berbincang tentang sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM perbankan, dengan Hedy Lopian merupakan pengalaman yang menarik. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari wanita peraih gelar *Master of Business Administration (M.B.A.)* bidang keuangan dari University of Pittsburgh, United State of America (USA), ini. Pengelolaan SDM memang baru diembannya pada tahun 2016 saat dipercaya menjadi Direktur SDM PT Bank CIMB Niaga Tbk. Namun, karena senang mempelajari hal-hal baru, Hedy menikmati peran baru tersebut. Pengalamannya berpuluh-puluh tahun menggeluti berbagai bidang di sektor perbankan tentunya menjadi bekal ketika dipercaya mengelola bidang *human resources (HR)*.

Hedy yang juga Anggota Bidang *Governance*, Pendidikan, dan Pengembangan SDM Perbanas melihat potensi SDM di Indonesia cukup bagus. Untuk bisa disejajarkan dengan SDM perbankan negara lain, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta. Bukan hanya sektor perbankan, semua sektor industri harus bisa mengembangkan SDM yang andal. Sehingga, SDM Indonesia dapat menjadi tuan rumah di semua industri, terutama dalam



menghadapi MEA 2020. Inilah harapan Hedy untuk Indonesia ke depan.

Bagaimana karakteristik SDM perbankan saat ini dan bagaimana pula sebaiknya bank meng-*handle* SDM-nya? Hedy menguraikannya kepada *Probank* di tengah padatnya agenda Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut ini petikannya:

Bagaimana Anda melihat SDM perbankan di Indonesia saat ini? Apakah mereka sudah kompetitif?

SDM Indonesia menunjukkan tingkat perbaikan yang cukup positif. Jika dilihat dari IMD World Talent Ranking 2018, Indonesia naik dua peringkat ke urutan 45 dari 63 negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Namun, dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, daya saing SDM Indonesia masih banyak yang harus ditingkatkan.

Revolusi industri 4.0 sudah terjadi di semua sektor di dunia. Namun, di Indonesia masih ada industri tradisional (level 1.0, 2.0) dan 3.0 sehingga revolusi industri 4.0 di Indonesia harus menjadi lokomotif yang dapat menarik gerbong industri tradisional tersebut secara bersamaan. Ke depan akan banyak pekerjaan yang bersifat transaksional dan berulang digantikan oleh robot dan *artificial intelligence* serta banyak keputusan menggunakan *data analytic* dan *big data*. Di sisi lain, akan timbul pekerjaan dan bidang baru, seperti *data analytic*, *data science*, dan pekerjaan berbasis teknologi informasi (TI).

Kita semua harus siap, dan Perbanas harus membantu mengembangkan ilmu-ilmu yang relevan. Untuk itu, bekerja sama dengan Perbanas Institute, Perbanas akan mengembangkan kurikulum digital dengan ilmu-ilmu yang relevan dan diperlukan untuk menjawab perubahan yang terjadi saat ini dan ke depan.

Kalau kita melihat Indonesia saat ini, setiap tahun ada dua juta tenaga kerja baru lulusan perguruan tinggi dengan ilmu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini dan tenaga pengajar dengan ilmu dan cara mengajar yang sama. Perbankan harus melakukan pengembangan yang berhubungan dengan digital sehingga tercipta SDM yang siap berkompetisi dengan negara ASEAN lainnya, terutama menghadapi MEA 2020. Kita harus menjadi SDM yang mumpuni dan relevan dengan daya saing serta produktivitas yang tinggi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Malah, harus bisa *export talent* ke negara lain.

Bagaimana kesiapan SDM perbankan Indonesia menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada 2020?

Kalau menurut saya, kita masih punya banyak pekerjaan rumah dalam menghadapi MEA. Pemerintah, pihak swasta,



dan asosiasi seperti Perbanas harus ikut berperan serta dan bekerja sama untuk membantu terciptanya SDM yang relevan dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Pendidikan vokasi sangat penting pada era ini, tapi harus dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan pihak swasta agar tercipta tenaga kerja dengan subjek yang relevan sehingga dapat serta-merta diserap oleh pihak swasta yang membutuhkannya.

Bisa diceritakan bagaimana strategi pengembangan SDM di Bank CIMB Niaga?

SDM kami sudah menuju digital dan *analytic*. Kami mendorong tim SDM supaya lebih mengerti bisnis secara keseluruhan dan meningkatkan *business accument*. Pembelajaran sudah tidak dilakukan secara

tradisional lagi, tetapi sudah berbasis aplikasi dan *gamification* sehingga belajar lebih menyenangkan serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kami banyak mengambil keputusan menggunakan analitik, misalnya menganalisis mengapa pada unit tertentu atrisinya tinggi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.

Kendala apa yang dihadapi saat melakukan pengembangan SDM seperti itu?

Atrisi yang tinggi pada satu unit tertentu akan berpengaruh pada kelangsungan bisnis unit tersebut dan pada bank secara keseluruhan. Tindakan preventif yang didasari analisis data akan membantu mencegah hal tersebut. Untuk pengembangan digital maupun analitik, diperlukan investasi yang tidak sedikit. Saya melihat pada kebanyakan perusahaan, investasi lebih diutamakan untuk kepentingan produk dan nasabah. Peran SDM sangat penting untuk membuktikan bahwa investasi pada bidang SDM adalah untuk kepentingan perusahaan secara menyeluruh, walaupun *benefit*-nya terlihat secara tidak langsung.

Bagaimana pula Bank CIMB Niaga memahami kebutuhan SDM generasi milenial?

Bank CIMB Niaga mengelompokkan mereka yang tergolong SDM generasi milenial adalah mereka yang berusia 35 tahun ke bawah. Di mana saat ini sudah 51%-nya dari seluruh karyawan yang ada di Bank CIMB Niaga.

Kebutuhan generasi milenial tentunya berbeda. Cara belajar tidak lagi *class room*. Mereka akan bosan dengan belajar di kelas. Satu setengah tahun terakhir, kami sudah memperkenalkan sistem belajar berbasis aplikasi dan *gamification*.

Remuneration yang ditawarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan para milenial melalui *flexi benefit*. Misalnya,

kalau dahulu, skema asuransi medikal berlaku sama untuk semua karyawan sesuai level jabatannya dengan tidak membedakan umur karyawan. Zaman sekarang tentunya berbeda. Anak muda karena senang berolahraga jadi jarang sakit sehingga kebutuhan asuransi untuk rawat inap menjadi lebih kecil.

Para milenial ini *'kan* sering berpindah-pindah, jadi bagaimana kami harus pandai-pandai berinovasi dalam hal *remuneration*, cara pengembangan, dan pembelajaran untuk dapat *me-retain* mereka.

Menurut Anda, pengembangan SDM seperti apa yang harus diterapkan perbankan sekarang ini?

Dengan perubahan dan perkembangan zaman saat ini, di mana proses dan keputusan harus dilakukan dengan cepat, maka diperlukan SDM yang kreatif, inovatif, responsif, dan *agile*. Untuk itu, kesadaran dan pola pikir supaya dapat menerima perubahan menjadi sangat penting untuk pengembangan SDM. Pengembangan pelatihan ulang (*reskill*) dan pendidikan lanjutan (*upskill*) tenaga kerja sangat diperlukan untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak revolusi industri 4.0 ini agar menjadi tenaga kerja yang relevan di berbagai bidang pekerjaan yang baru. Yang juga sangat penting, meningkatkan produktivitas SDM kita agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya.

Bagaimana Anda melihat perubahan dunia yang begitu cepat dan apa yang sebaiknya dilakukan para pemangku kepentingan di industri perbankan dan sektor lainnya?

Perubahan dan perkembangan teknologi yang demikian cepat memengaruhi kebutuhan nasabah yang juga berubah dengan cepat. Hal ini harus ditanggapi dengan cepat, baik oleh industri perbankan maupun *regulator*. Sayangnya, saat ini tingkat birokrasi masih sangat tinggi, baik di industri maupun *regulator*. Sementara, pemain-pemain *fintech* di luar lembaga keuangan dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel. Karena itu, pelaku industri, asosiasi, dan *regulator* harus secara bersama-sama menciptakan level *playing field* yang sama antara industri perbankan dan pemain-pemain *fintech*.

Hal tersebut pernah didiskusikan di ajang Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018. Di ajang tersebut terjadi diskusi antara pelaku sektor riil, perbankan, dan *regulator*, yang antara lain membahas tentang kebutuhan sektor riil di era revolusi industri 4.0. Kebutuhan ini harus ditanggapi dengan cepat oleh industri perbankan dan *regulator*. ■

Challenge Myself to The Limit

Kalimat di atas menjadi roh bagi Hedy saat menjalani hidup. Filosofi ini juga menjadi dasar saat dirinya dipercaya menangani sumber daya manusia (SDM) di Bank CIMB Niaga. Sebelumnya Hedy lebih sering dipercaya menangani bidang bisnis, *risk management*, dan keuangan di beberapa bank. Di sinilah saatnya ia belajar hal-hal baru terkait dengan pengelolaan SDM. "Saya senang dengan tantangan, dan semuanya dijalankan sambil belajar," ujarnya.

Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Spirit tadi juga ditanamkan Hedy kepada anggota timnya. "*Challenge yourself to the limit, you'll be surprise on what you can achieve,*" demikian pesan Hedy. Kita harus berani menantang diri kita untuk

melakukan sesuatu sampai batas akhir. Karena, kita tidak pernah bisa mengira apa yang dapat kita capai. Bila ternyata bisa, akan menjadi sebuah *surprise* untuk diri kita. "Ternyata kita bisa *lo,*" tambahnya.

Pada situasi tertentu kita harus berani *push* diri sendiri. Akan tetapi, juga harus dibarengi dengan kerja keras, bekerja dengan hati, dan selalu membuka diri untuk ilmu-ilmu yang baru. Hal tersebut selalu disampaikan Hedy kepada anggota timnya.

Men-*challenge* diri bukan hanya diterapkan Hedy saat bekerja. Dalam menjalani hobi *travelling*, Hedy pun berpegang pada prinsip ini. "Setiap tahun saya harus ke satu tempat yang saya belum pernah," ujarnya. New Zealand dan Italia adalah negara terakhir yang dikunjungi Hedy dalam dua tahun terakhir. Di tempat yang dikunjunginya, Hedy banyak mengeksplorasi budaya, alam, dan

makanannya. Tak jarang Hedy berwisata dengan berkendara di tempat-tempat tersebut. Berkeliling Inggris dengan berkendara adalah satu tujuannya ke depan. "Tapi, saya juga ingin mencoba *drive* dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur tol yang baru," tambahnya dengan bersemangat.

Tak hanya *travelling*, wanita yang menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung ini juga gemar ber-*line dance*. "Dengan *line dance*, kita bisa melatih ingatan, fokus, *teamwork*, dan *networking,*" pungkask bankir yang sering ber-*line dance* bersama *Ladies Bankers*-nya Perbanas ini.



Rapat Pleno Nasional dan Rapat Umum Anggota Perbanas 2019

Pada 24 Juni 2019 Perbanas menyelenggarakan Rapat Pleno Nasional dan Rapat Umum Anggota (RUA) 2019 di Ballroom C Hotel Shangri-La Jakarta. Rapat dihadiri oleh Pengurus Perbanas, Perwakilan Perbanas Daerah, dan Yayasan Pendidikan Perbanas serta Perbanas Institute.

Rapat dibagi dua sesi. Sesi pertama membahas laporan perwakilan Perbanas Daerah dan Yayasan Pendidikan Perbanas serta Perbanas Institute. Dalam sesi tersebut disampaikan wacana perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perbanas. Penyusunan draft ART akan melibatkan Perbanas Daerah. Pada sesi kedua disampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Perbanas 2018 kepada anggota dan laporan kegiatan masing-masing bidang selama 2018. RUA Perbanas 2019 dihadiri Pengurus Perbanas, perwakilan Perbanas Daerah, serta Pengurus Yayasan Pendidikan Perbanas (YPP). ■



Menuju Sentralisasi Organisasi

Di tengah melambatnya perekonomian dalam beberapa tahun terakhir, Perbanas mengemas banyak kegiatan demi meningkatkan kinerja industri perbankan dan perekonomian nasional. Ke depan akan lebih banyak kegiatan Perbanas Daerah yang bersinergi dan melibatkan pengurus Perbanas Pusat.

Sebagai asosiasi industri perbankan, Perbanas akan terus memberikan masukan dan membuka komunikasi dengan regulator. Hal ini disampaikan Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, dalam pembukaan Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas 2019 yang dibacakan Farid Rahman, Wakil Ketua Umum Perbanas, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 24 Juni 2019.

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perbanas Pasal 14 Ayat 2, RUA Perbanas diselenggarakan setiap tahun dan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda RUA Perbanas 2019 adalah laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan laporan kegiatan masing-masing bidang selama 2018. RUA Perbanas kali ini dihadiri Pengurus Perbanas, perwakilan Perbanas Daerah, serta Pengurus Yayasan Pendidikan Perbanas (YPP).

Selama 2018 Perbanas banyak melakukan dialog dengan institusi yang terkait dengan industri perbankan, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis perbankan, Perbanas melakukan beberapa sosialisasi. Di antaranya, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.

Perubahan dunia yang begitu cepat, di mana semua aktivitas sangat bergantung pada kemajuan teknologi, juga menjadi perhatian industri perbankan. Industri ini menyadari bahwa nasabah membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam transaksi. Namun, industri perbankan tidak bisa memenuhi tuntutan itu tanpa didukung regulasi. Untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, regulator, perbankan, dan industri terkait lainnya, Perbanas menggelar Indonesia Banking Expo (IBEX) pada 15 November 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta.

IBEX 2018 mengangkat tema "*The Next Generation of Banking in the Fourth Industrial Transformation*". Tema tersebut sengaja diangkat untuk memberikan gambaran



RUA Perbanas 2019; perubahan ART

kepada pemangku kepentingan bahwa perbankan sudah siap menghadapi tantangan zaman. Di lain sisi, ajang ini menjadi semacam pengingat bagi industri perbankan untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian dan tunduk pada aturan yang digariskan regulator.

Pembenahan ART

RUA Perbanas 2019 diawali dengan rapat pleno yang berisi laporan Perbanas Daerah dan YP Perbanas. Dari 32 Perbanas Daerah, hanya 15 Perbanas Daerah yang mengirimkan wakilnya. Menurunnya keanggotaan Perbanas Daerah menjadi salah satu masalah yang disampaikan perwakilan tersebut. Keberadaan beberapa organisasi di lingkungan industri perbankan menjadi penyebab turunnya jumlah anggota Perbanas Daerah.

Di setiap daerah ada Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) yang dikelola Bank Indonesia (BI) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKJK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa bank membatasi keanggotaan kantor cabangnya di organisasi daerah tersebut dengan alasan efisiensi biaya. Meski, tak

dimungkir, Perbanas Daerah sering berkolaborasi dengan dua organisasi tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan.

Melihat masalah yang dihadapi Perbanas Daerah, Rapat Pleno 2019 juga membahas tentang wacana perbaikan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perbanas. Konsep sentralisasi organisasi dilontarkan dalam forum tersebut. Dalam paparannya, Fransiska Oei, Ketua Bidang Hukum Perbanas, menyatakan bahwa nantinya pemungutan iuran anggota Perbanas akan dilakukan Perbanas Pusat kepada kantor pusat bank. Jadi, kantor cabang di daerah tidak perlu membayar iuran keanggotaan di Perbanas Daerah. Alokasi dana dari Perbanas Pusat ke Perbanas Daerah disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu, setiap tahun—paling lambat per September—Perbanas Daerah harus mengusulkan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya.

Perubahan sentralisasi iuran anggota ini dilakukan untuk mengantisipasi turunnya jumlah anggota Perbanas Daerah. Menurut Danny Hartono, Sekretaris Jenderal Perbanas, selama ini keanggotaan Perbanas Daerah diserahkan kepada masing-masing kantor cabang di daerah. “Naik turunnya anggota Perbanas Daerah juga karena tutupnya kantor cabang,” tambahnya. Dengan konsep sentralisasi ini, diharapkan organisasi berada dalam satu suara untuk menjalankan rencana kerja Perbanas Pusat ke Perbanas Daerah.

Kekhawatiran bakal menurunnya kegiatan Perbanas Daerah karena sentralisasi ini disampaikan perwakilan Perbanas Daerah. Namun, ditegaskan bahwa tujuan sentralisasi bukan untuk menurunkan kegiatan Perbanas Daerah. “Hal ini sudah dibicarakan dengan *CEO (chief executive officer)* masing-masing bank,” ungkap Ahmad Siddik Badruddin, Ketua Bidang Organisasi Perbanas.

Yang sebaiknya dikurangi adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi Perbanas Pusat serta kegiatan yang melibatkan segelintir orang. “Kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi anggota akan didukung,” tambahnya. Wacana perubahan ART yang disampaikan dalam Rapat Pleno Perbanas 2019 ini memang belum bersifat final. Perbanas Daerah dilibatkan dalam menyusun perubahan ART ini.

Pengembangan SDM Perbankan

Selain menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan membangun industri perbankan yang sehat, Perbanas secara nyata mencetak sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai. Hal ini diwujudkan melalui Yayasan Pendidikan Perbanas yang mengelola Perbanas Institute. Untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan, Perbanas mengemas program dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kurikulum berbasis digital juga disusun oleh Perbanas Institute.

Dalam laporan yang disampaikan pada Rapat Pleno Perbanas 2019, proses belajar mengajar di Perbanas Institute disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jadwal dan tempat belajar yang fleksibel, seperti waktu belajar di luar hari kerja dan diselenggarakan di luar Jakarta.

Menurut Aviliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, yang ditawarkan Perbanas Institute mendapat respons baik dari masyarakat dan industri perbankan. Program belajar jarak jauh atau *online* juga ditawarkan Perbanas Institute. Semua yang dilakukan Perbanas Institute ini untuk mendukung industri perbankan dan membangun lembaga pendidikan perbankan yang berkualitas. ■

Catatan dari Daerah

Rapat Pleno dan Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas dihadiri oleh 15 perwakilan Perbanas Daerah. Perwakilan Perbanas Daerah mendapat kesempatan melaporkan kegiatan mereka selama maksimal lima menit dalam rapat pleno. Laporan kegiatan dari Perbanas Daerah tidak banyak berbeda. Sebagian kegiatan Perbanas Daerah memang diselaraskan dengan Perbanas Pusat, seperti kegiatan yang berkaitan dengan hari keagamaan, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perbankan.

Masalah yang dihadapi Perbanas Daerah pun hampir sama. Keanggotaan dan minimnya personel yang bersedia aktif dan menjadi pengurus Perbanas Daerah disampaikan beberapa perwakilan. Selain itu, sebagian pengurus Perbanas Daerah menjadi pengurus BMPD dan FKJK. Keberadaan beberapa organisasi yang menaungi industri perbankan di daerah juga menyebabkan makin berkurangnya anggota Perbanas Daerah.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut, geliat kegiatan Perbanas Daerah cukup bagus. Namun, sebagian dari perwakilan Perbanas Daerah berharap, pengurus Perbanas Pusat lebih sering hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan Perbanas Daerah. Mereka berharap, pengurus Perbanas Pusat, yang notabene bankir-bankir profesional, dapat berbagi ilmu kepada pelaku bisnis perbankan daerah.

Suasana rapat pleno yang digelar dari pagi hingga siang hari cukup terbuka. Semua masalah yang dihadapi Perbanas Daerah ditampung dalam rapat tersebut. Tak hanya masalah yang terkait dengan organisasi, keluhan pelaku bisnis perbankan di daerah, seperti penghitungan pajak pesangon untuk karyawan yang memasuki masa purnabakti, juga disampaikan dalam forum ini. Henrij, Ketua Perbanas Lampung, mengharapkan Perbanas Pusat dapat mencari solusi. Karena, tak menutup kemungkinan masalah ini juga dihadapi karyawan bank di daerah lain.

Arbitrase untuk Selesaikan Sengketa

Arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Penyelesaian sengketa lewat badan arbitrase dinilai lebih efektif ketimbang peradilan umum karena putusan arbitrase tak memakan waktu lama seperti pengadilan dalam perkara perdata.

Sengketa merupakan fakta kehidupan dan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Gesekan, beda pendapat, beda kepentingan, termasuk sengketa, memang lumrah terjadi lantaran adanya interaksi satu sama lain.

Kasus sengketa, misalnya sengketa bisnis dan sengketa ekonomi, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat beradab, sengketa bisa diselesaikan secara baik-baik. Lazimnya, upaya penyelesaian sengketa diatur dalam kontrak antarpada pihak yang bersengketa dan secara musyawarah atau melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua. Satu, adjudikasi, yaitu litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi dengan adjudikasi (arbitrase). Dua, nonadjudikasi atau memakai pihak ketiga (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli).

Masyarakat diberi keleluasaan untuk memilih jenis penyelesaian sengketa. Sementara, bagi pihak-pihak yang tidak ingin menyelesaikan sengketa lewat jalan litigasi atau pengadilan dengan alasan kerahasiaan atau kepentingan pribadi dapat memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau melalui proses arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal itu sesuai dengan Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam UU yang sama, pada pasal 5, dijelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kemudian, sengketa



Kantor Pengadilan; makan waktu lebih lama

yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Sumber hukum arbitrase diambil dari perjanjian arbitrase, peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan atau hukum internasional, seperti Piagam PBB, Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law, dan Washington Convention 1965.

Asas-asas pokok arbitrase meliputi nonintervensi pemerintah dan pengadilan, adanya otonomi para pihak atau berdasarkan kebebasan berkontrak,

penyelenggaraannya bisa *ad-hoc* atau institusional, independensi arbiter, dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, di antaranya bersifat rahasia, fleksibilitas dalam prosedur, dan persyaratan administratif, hak pemilihan atau penunjukan arbiter berada di tangan para pihak, pilihan hukum, forum dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian (kausula arbitrase), putusan arbitrase final dan mengikat, serta penyelesaiannya relatif cepat.

Salah satu badan arbitrase di Tanah Air adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI. BANI didirikan pada 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Saat ini BANI telah memiliki kantor perwakilan di Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Jambi.

Hingga kini sudah lebih dari 1.000 perkara sengketa yang diselesaikan oleh BANI. Selama periode 2015-2018, *leasing* menjadi sektor bisnis yang paling banyak didaftarkan pada BANI, yaitu 27,48%, disusul sektor konstruksi 26,00%, sektor

IT/telekomunikasi 14,38%, sektor lainnya 12,05%, sektor perdagangan 8,25%, sektor tambang/energi 4,86%, sektor transportasi 2,96%, sektor investasi 1,90%, sektor keagenan 1,06%, sektor asuransi 0,85%, dan sektor keuangan 0,21%.

BANI ikut berperan dalam dunia arbitrase internasional, seperti menjadi anggota Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), International Council for Commercial Arbitration (ICCA), dan Regional Institutes of Arbitrators Forum (RAIF)—diganti oleh Indonesia Arbitrator Institute (IArbi) sejak 2012.

Peran BANI dalam Arbitrase Nasional

Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, kehadirannya pada saat itu belum diketahui oleh khalayak luas. Kemudian, pada 1977 lahirlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mulai dikenal. Saat itulah dikatakan sebagai kebangkitan arbitrase Indonesia.

Demikian dijelaskan oleh Ketua BANI sekaligus Presiden Asia Pacific Regional Arbitration Group, Husseyn Umar, dalam Diskusi dan Edukasi untuk Jurnalis “Pengertian dan Pemahaman Arbitrase sebagai Cara Menyelesaikan Sengketa” di Jakarta.

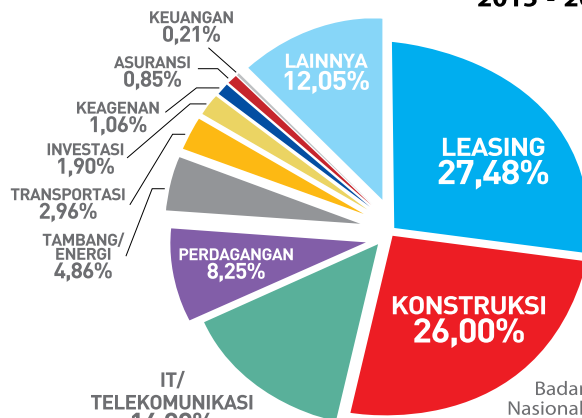
Menurut Husseyn, penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi melalui badan arbitrase bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (arbiter). Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.

“Penyelesaian melalui badan arbitrase memiliki keunggulan, yakni bersifat rahasia. Hanya para pihak bersengketa yang mengetahui permasalahan mereka,” kata Husseyn. Selain itu, penyelesaian melalui badan arbitrase lebih fleksibel dalam prosedur maupun persyaratan administratif.

Keunggulan lain, lanjut Husseyn, para pihak yang bersengketa memiliki hak penunjukan arbiter, memiliki pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian (kausula arbitrase). “Penyelesaian sengketa pun relatif cepat. Maksimal 180 hari kerja,” tukasnya.

Sampai dengan saat ini, BANI memiliki sekitar 150 arbiter yang terdaftar, baik berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Setiap arbiter itu memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Keberhasilan arbitrase dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: iktikad baik para pihak yang bersengketa, kepatuhan para pihak untuk tunduk pada putusan arbitrase dan melaksanakannya dengan benar, integritas dan profesionalisme para arbiter, dan sikap pengadilan terhadap

PERKARA YANG DIDAFTARKAN Berdasarkan Sektor Bisnis 2015 - 2018



Sumber: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

pelaksanaan putusan.

Guna memajukan arbitrase di Indonesia, Husseyn menyarankan pemerintah, dunia usaha, praktisi hukum untuk lebih merekomendasikan penggunaan arbitrase di dalam negeri (BANI). Kemudian, perlu langkah konkret perubahan atau pembentukan UU arbitrase yang mengadopsi UNCITRAL Model Law, berupa pilihan UU Amandemen atau UU Arbitrase Internasional Khusus.

Sementara itu, Advisor BANI, Bambang Widjojanto, memaparkan peran strategis BANI dalam perkembangan dunia bisnis dan usaha yang melesat, baik di domestik maupun internasional. Ia memberikan contoh perkembangan *start up* ekonomi digital 46 Indonesia yang mampu menyerap modal total Rp56 triliun pada 2018. Ia memprediksi Indonesia akan menguasai omzet ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 dan bakal mencapai Rp3.500 triliun.

“Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa bisnis. Tak ada bisnis yang tak punya potensi sengketa. Sengketa dalam dunia bisnis punya dampak besar. Tak hanya pada risiko-risiko ekonomi, tapi juga mengganggu hubungan pihak,” kata Bambang.

Karena itu, lanjut Bambang, butuh penanganan sengketa secara efisien dan efektif. “*Nah*, badan arbitrase seperti BANI inilah cara penyelesaian komersial yang efektif. Keputusan BANI itu *win-win solution*. Bukanlah *win or lose*,” tambahnya.

Pada sesi ketiga diskusi dan edukasi, Eko Dwi Prasetyo, Sekretaris I BANI, menjelaskan hukum acara arbitrase. Prosedur arbitrase di BANI, kata Eko, dimulai dari perjanjian arbitrase membawa sengketa ke BANI atau menggunakan peraturan dan prosedur BANI, penyampaian permohonan mengadakan arbitrase, dan penunjukan arbiter.

Terkait dengan biaya, ada tiga komponen biaya pokok yang diberlakukan, yakni biaya registrasi, biaya perkara, dan biaya pendaftaran putusan pengadilan negeri. Di luar itu ada pula biaya-biaya tambahan lain, tergantung kondisi.

Pada kesempatan yang sama, arbiter senior BANI, Zen Umar Purba, mengatakan, sifat arbitrase yang menjaga kerahasiaan dan tertutup merupakan prinsip arbitrase. Inilah kekhususan arbitrase dengan tujuan menjaga kerahasiaan usaha. Selain itu, keputusan hukum arbitrase final dan mengikat (*final and binding*). Putusan arbitrase mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan.

“Yang menjadi kunci kekuatan mengikat arbitrase adalah kewajiban para pihak untuk membuat perjanjian tertulis. Perjanjian inilah yang menjadi dasar pembentukan dan eksistensi arbitrase,” ujar Zen. ■

Tak Sekadar Berpromosi

OJK mewajibkan iklan yang dibuat LJK memenuhi empat kriteria, yaitu akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Belum ada sanksi bagi LJK yang iklannya belum memenuhi empat kriteria tersebut. Ke depan akan ada aturan dan sanksi yang dituangkan dalam sebuah regulasi.

Pada era 1980-an, ketika mendengar kata iklan, yang ada di benak kita adalah kegiatan propaganda atas sebuah produk. Saat itu bila kita mengikuti rangkaian acara di stasiun televisi ada satu program yang khusus menyajikan iklan beragam produk. Tentu adu kreativitas disodorkan para pelaku industri periklanan di Indonesia untuk merebut perhatian konsumen. Mereka menggunakan pendekatan psikografis, hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup atau *lifestyle* mulai mendominasi tampilan iklan. Termasuk penggunaan gaya bahasa dalam beriklan.

Pada era 1990-an simbolisasi dan pencitraan makin banyak digunakan dalam teks iklan. Apalagi pada era tersebut teknologi sudah sangat mendukung kreativitas penciptaan sebuah iklan. Bahasa gambar atau visualisasi mendominasi dalam kegiatan periklanan.

Perkembangan informasi dan teknologi tentunya memudahkan sebuah perusahaan dalam membuat desain iklan yang menarik. Namun, kreativitas yang dihasilkan tetap harus menghasilkan informasi yang mudah dimengerti dan tidak menyesatkan masyarakat.

Persyaratan Iklan

Sebagai lembaga yang menaungi lembaga jasa keuangan (LJK) di Tanah Air, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat *concern* dengan iklan yang disajikan LJK. Industri jasa keuangan di sini adalah bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi dan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, perusahaan penjaminan, penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi baik yang sifatnya konvensional maupun syariah, penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*), serta lembaga keuangan lainnya yang mendapatkan izin atau pendaftaran dari OJK.

Bagaimana sebaiknya sebuah iklan dibuat. OJK membuat pedoman bahwa sebuah iklan harus mengandung informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Langkah yang diambil OJK ini sebagai upaya untuk melindungi konsumen.



Iklan salah satu bank; akurat, jelas, dan jujur

Sesuai dengan ketentuan OJK, iklan LJK yang menampilkan kata “satu-satunya” harus disertai sumber yang akurat. Bila iklan tersebut menyajikan kinerja periode sebelumnya dan proyeksi kinerja periode yang akan datang tidak diperbolehkan mencantumkan kata-kata “pasti berhasil”. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sebuah LJK mampu mengantongi laba atau memberikan *gain* investasi positif, dalam beriklan mereka tidak boleh menjanjikan kinerja yang sama pada periode mendatang, misalnya dengan mencantumkan kata-kata “pasti untung”. Data riset yang ditampilkan dalam iklan pun harus dari lembaga yang independen.

Lalu, bagaimana sebaiknya bahasa yang digunakan dalam beriklan. OJK menandakan bahasa yang digunakan harus jelas dan benar-benar mudah dipahami oleh masyarakat. Bila produk yang ditawarkan berbasis syariah, harus benar-benar memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Ada beberapa produk yang memberikan hadiah kepada konsumen. OJK menggariskan, persyaratan mendapatkan hadiah harus disampaikan melalui iklan. Demikian juga bila dalam kondisi tertentu perusahaan bersedia mengembalikan uang kepada nasabah. Mekanismenya harus benar-benar dicantumkan di iklan tersebut supaya masyarakat mengetahui dengan baik.

Iklan yang diterbitkan semua LJK harus mencantumkan logo OJK.

Hal penting lainnya yang harus dipahami LJK dalam membuat iklan adalah hindari kata-kata yang berlebihan. Bila ada testimoni harus benar-benar dari konsumen LJK dan disampaikan secara jujur. Jangan pula menjanjikan proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur di LJK tersebut. Banyak perusahaan yang menggunakan model dalam sajian iklannya. OJK melarang iklan yang dibuat LJK diperankan oleh anak-anak di bawah tujuh tahun, pejabat negara, dan tokoh agama. Klaim halal untuk produk yang diiklankan hanya diperbolehkan untuk produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait dengan ketentuan pemasangan iklan ini, Sarjito, Deputy Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa OJK telah menyiapkan sanksi tegas bagi LJK yang tidak mengikuti pedoman yang digariskan OJK. Saat ini OJK hanya



Sarjito; sanksi tegas

menyiapkan sanksi berupa teguran untuk menghentikan iklan LJK yang tidak memenuhi pedoman OJK.

Upaya OJK untuk menertibkan iklan yang dibuat LJK yaitu dengan merevisi dan menambahkan aturan mengenai iklan LJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sarjito mengakui bahwa iklan secara *clear* belum dicantumkan di POJK ini. “Kita akan masukkan beberapa ketentuan, seperti *peer to peer lending* dan *crowdfunding*,” tambah Sarjito.

Sekali lagi, langkah yang ditempuh OJK ini untuk menjaga kelangsungan bisnis LJK yang sehat dan melindungi konsumen. ■

Iklan dari Zaman ke Zaman

Iklan sudah dikenal sejak zaman dulu oleh bangsa Mesopotamia dan Babilonia sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman itu para pemilik barang menyewa perahu dan menyuruh orang untuk menyampaikan pesan dan mengantarkan barang kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan menyampaikan pesan ini dikategorikan dengan iklan. Sebab, saat itu belum dikenal huruf untuk kegiatan penulisan.

Pada zaman Romawi kegiatan promosi selangkah lebih maju. Bukti sejarah menunjukkan banyak ditemukan informasi dalam bentuk pahatan di dinding kota. Dari bukti ini terlihat sudah ada komunikasi antara pemilik barang dan konsumen. Produsen sudah berusaha memberikan informasi atas barang yang dimilikinya kepada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi target pasarnya.

Beberapa toko di zaman Romawi bahkan sudah menggunakan papan nama untuk sarana promosi. Hal ini bisa dilihat dari ditemukannya stempel batu milik T. Vindaius Arivertstus yang isinya menawarkan obat paling mujarab dengan merek Chloron yang ditemukan di Inggris. Penggunaan simbol di luar tempat usaha dalam bentuk iklan cetak yang disebut *hoarding* menjadi cikal bakal penggunaan media luar ruang.

Cara beriklan mulai berubah sejak ditemukannya kertas di Tiongkok pada 1275. Selanjutnya lebih berkembang lagi dengan ditemukannya mesin cetak oleh Guttenberg di Mainz, Jerman, pada 1455. Dari situ dimulailah iklan dalam bentuk cetak.

Iklan cetak pertama muncul di Inggris pada 1472 dalam bentuk poster yang mengiklankan penerbitan buku-buku doa

gereja. Surat kabar pertama yang terbit di London pada 1650 menggunakan cara pemberitaan berbentuk iklan. Di Amerika Serikat (AS) surat kabar pertama yang memasang iklan adalah *Boston Newsletter* yang terbit pada 1704. Iklan ditata dengan cara bisnis modern dimulai pada 1892. Saat itu N.W. Ayer, sebuah lembaga periklanan di AS, mulai memperbaiki teknik penyampaian pesan untuk mempersuasi konsumen dengan manajemen iklan sesuai dengan permintaan pemasang iklan. Iklan majalah pertama muncul di Majalah *Southern Messenger* pada Juli 1844 di bawah arahan Edgar Allen Poe.

Dunia periklanan kian berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Iklan radio mulai dikenal pada 1920 di Pittsbur, Pennsylvania. Selanjutnya, pada 1930 mulai dikenal pemasangan iklan di televisi. Perkembangan dunia periklanan setelah Perang Dunia Kedua hingga pengujung abad ke-20 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian dunia. Dalam kurun waktu ini dunia periklanan dibagi menjadi tiga era, yaitu era *unique selling proposition*, era *the positioning*, dan era perhatian terhadap lingkungan.

Perkembangan teknologi pada awal abad ke-21 berpengaruh pada industri periklanan. Adanya televisi kabel menjadikan masyarakat bisa memilih program yang mereka sukai. Media ini juga menjadikan televisi yang tadinya dapat menjangkau semua orang bergeser kepada kelompok masyarakat dengan pilihan yang lebih spesifik. Penggunaan internet juga menjangkau konsumen yang lebih spesifik. Mereka bisa langsung mencari informasi terkait dengan produk yang mereka inginkan.

Membenahi Penerapan AEOI

Komitmen Indonesia untuk menerapkan *AEOI* pada September 2018 didukung industri perbankan. Karena merupakan kebijakan baru, DJP berulang-ulang melakukan sosialisasi mekanisme pelaporannya. Langkah ini mendapatkan respons positif pelaku perbankan.

Menyikapi kesepakatan penerapan *automatic exchange of financial account information (AEOI)* pada 2009, pemerintah sudah menyusun perangkat regulasi sebagai acuannya. Dimulai pada 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selanjutnya PMK ini mengalami dua kali perubahan. Pertama melalui PMK No.73/PMK.03/2017 dan kedua melalui PMK No.19/PMK.03/2018.

Melengkapi regulasi penerapan *AEOI*, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini disahkan menjadi undang-undang (UU) pada 23 Agustus 2017, yakni UU RI Nomor 9 Tahun 2017.

Dengan adanya regulasi itu, Pemerintah Indonesia tentunya jauh lebih siap dalam mengeksekusi pelaporan informasi keuangan untuk mencegah penggelapan pajak dari dalam maupun luar negeri. Pada praktiknya, ada dua jenis pelaporan informasi keuangan, yakni pelaporan otomatis dan pelaporan manual melalui permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan otomatis adalah jenis pelaporan tanpa harus diminta. Setiap akhir tahun kalender, rekening keuangan yang sudah didaftarkan akan mengirimkan laporan keuangan secara otomatis yang notabene mempermudah proses pelaporan dan analisis.

Pihak atau lembaga yang melakukan pelaporan terbagi ke dalam dua kelompok, yakni lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor. Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan pelapor antara lain sektor perbankan, sektor pasar modal seperti manajer investasi, sektor perasuransian yang mencakup segala jenis perusahaan asuransi, lembaga layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (TI), dan koperasi simpan pinjam. Sedangkan, lembaga keuangan nonpelapor antara lain entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, dan entitas lainnya yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak. Proses registrasi *AEOI* dapat dilakukan secara *online* dengan mengakses eoi.pajak.go.id.



Layanan pajak; partisipasi aktif

Penyederhanaan Sistem Pelaporan

Ada beberapa hal yang harus dilaporkan dalam pelaporan informasi keuangan, yakni harus ada identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender, dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan. Sementara itu, pihak-pihak yang rekening keuangannya harus dilaporkan ialah rekening keuangan milik warga negara Indonesia, warga negara asing di Indonesia selain yang dilaporkan dalam perjanjian internasional, dan entitas di Indonesia.

Pelaporan informasi keuangan langsung kepada DJP bisa mengantisipasi dan meminimalisasi penyembunyian aset atau pengelakan pajak dari luar ataupun di dalam negeri karena sistem yang digunakan sangat ketat dan komprehensif. Bahkan, karena lengkap dan terperinci laporan keuangan yang harus diberikan, sejumlah lembaga keuangan melalui Perbanas mengatakan pihaknya mengalami kesulitan pelaporan karena format pelaporan yang diterapkan sangat kompleks.

Hal itu pun mendorong pihak DJP melakukan penyederhanaan pelaporan informasi keuangan. Pada acara “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan Domestik Perbankan” pada 12 April 2019 di Auditorium Perbanas Institute, beberapa waktu lalu, Andik Tri Sulistyono, Kepala Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan I DJP,

PROSEDUR IDENTIFIKASI UNTUK MENENTUKAN REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN



YURISDIKASI ASING adalah negara atau yurisdiksi selain Indonesia.

YURISDIKASI TUJUAN PELAPORAN adalah Partisipasi yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi secara otomatis.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

menjelaskan bahwa format pelaporan domestik telah disederhanakan. “Jadi, informasi keuangan yang panjang dan terdiri atas 16 *sheets* itu sebenarnya informasi yang utama hanya dua, yaitu informasi mengenai rekening keuangan itu sendiri dan mengenai entitas,” ujar Andik.

Disederhanakannya format laporan informasi keuangan diharapkan akan meningkatkan partisipasi lembaga keuangan untuk melakukan pelaporan

informasi keuangannya. Hal itu mengingat baru 50% lembaga keuangan yang melaporkan informasi keuangan nasabah atau konsumennya ke DJP.

“Pada laporan tahun pertama terdapat 50% lembaga keuangan pelapor yang menyampaikan laporannya itu nihil,” terang Andik.

Sistem atau regulasi ini akan efektif dalam meminimalkan modus penghindaran pajak, yang bukan hal baru dalam dunia keuangan. Namun, agar penerapan

aturan ini maksimal, tentunya harus ada partisipasi aktif dari para *stakeholder* terkait.

Para banker dan pimpinan lembaga keuangan yang lain harus menaati regulasi ini jika ingin melihat dampak nyata dari diberlakukannya aturan ini. Yuwono Waluyo, Direktur Bisnis Bank Mega Syariah, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti regulasi eksternal yang ada dalam rangka menaati peraturan. Pihaknya siap bekerja sama dengan Dirjen Pajak dalam pelaporan domestik perbankan.

Hal yang sama juga akan dilakukan pihak Bank Mandiri Syariah, yang mengaku siap memenuhi persyaratan *AEOI*. Anton Sukarna, *SEVP Distribution and Service* Bank Mandiri Syariah, menegaskan bahwa Bank Mandiri Syariah akan mengikuti peraturan terkait.

Seberapa efektif penerapan peraturan pelaporan informasi keuangan untuk meminimalisasi pengelakan pajak, kita harus menunggu beberapa waktu ke depan untuk melihat efek riilnya. Yang pasti, dengan adanya *AEOI* ini, celah-celah pengelakan atau penggelapan pajak semakin dipersempit. ■

Pudarnya Era Kerahasiaan

Kehidupan modern sudah tidak memungkinkan sebuah negara menutup diri dan tidak membangun kerja sama yang terbuka dengan negara lain. Perekonomian dunia pun sepertinya sudah tidak ada batasnya. Blok-blok ekonomi politik sudah tidak seperti era dua puluh atau tiga puluh tahun lalu.

Kondisi ini yang mendorong para pemimpin dunia yang tergabung dalam Group of Twenty (G-20)—dalam hal ini Indonesia menjadi anggotanya—mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir. Hal itu disampaikan dalam “G-20 Leaders’ London Summit” yang diselenggarakan pada April 2009.

Menindaklanjuti pertemuan G-20 di London tersebut, pada September 2009, Indonesia bergabung dalam Global Forum of Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Forum ini didirikan pada 2000 dan pada September 2009 dilakukan restrukturisasi.

Keterlibatan Indonesia dalam mendukung pertukaran

informasi terkait dengan perpajakan terus bergulir. Pada November 2011 Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC). Pasal 6 dokumen ini mengatur pelaksanaan *AEOI*. Pada September 2013 dan November 2014 melalui forum G-20, Indonesia mendukung komitmen implementasi *AEOI*. Tahun berikutnya, tepatnya Juni 2015, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang mencantumkan komitmen Indonesia mengimplementasikan *AEOI* pada September 2018.

Selain Indonesia, sebanyak 50 negara berkomitmen menerapkan *AEOI* pada 2018. Sebelumnya sudah ada 49 negara yang berkomitmen mengimplementasikan *AEOI* pada 2017 dan ada delapan negara yang akan mengimplementasikan *AEOI* pada 2019-2020. Masih ada 45 negara yang belum menetapkan kapan akan menerapkan *AEOI*.

Sosialisasi Penerapan AEOI

Pada 12 April 2019 Perbanas menyelenggarakan “Sosialisasi Penerapan *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)*” di Griya Perbanas, Jakarta. Sosialisasi yang dihadiri praktisi perbankan — mewakili bank-bank anggota Perbanas— ini diselenggarakan karena tenggat pelaporan AEOI jatuh pada 30 April 2019. Dengan adanya sosialisasi ini, industri perbankan diharapkan bisa memahami dan memenuhi persyaratan pelaporannya.

Arief Tjahjono, Pengurus Perbanas, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas respons baik anggota Perbanas dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi penerapan AEOI disampaikan oleh Andik Tri Sulistyono, Kepala Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan I Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam paparannya, Andik menjelaskan bahwa lembaga keuangan wajib menyampaikan pelaporan kepada Ditjen Pajak untuk menghindari penolakan pajak seperti tindakan *offshore financial center*. Lembaga keuangan di sini terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor.

Lembaga keuangan pelapor terdiri atas sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, lembaga layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (TI), dan koperasi simpan pinjam. Sedangkan, yang termasuk dalam lembaga keuangan nonpelapor ialah entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, dan entitas lainnya yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak.

Pelaporan AEOI dapat dilakukan secara online dengan mengakses *website eoi.pajak.go.id*. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan makin banyak lembaga keuangan yang melakukan pelaporan informasi keuangan. “Pada tahun pertama terdapat 50% lembaga keuangan pelapor yang menyampaikan laporannya itu nihil,” ujar Andik. ■



Perbanas Sumut Bagikan Bingkisan Lebaran

Seperi tahun-tahun sebelumnya, menyambut Idulfitri 1440 H, yang jatuh pada 5-6 Juni 2019, Perbanas Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan bakti sosial (baksos). Kegiatan yang diselenggarakan di Kompleks Griya Marelan, Titipapan, Medan, pada 15 Mei 2019, ini merupakan kerja sama Perbanas Sumut dengan Lions Club Medan (LCM) Bankers.

Thomas Cipta Kusuma, Ketua Perbanas Sumut yang juga Charter President Lions Club Bankers, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini rutin diadakan menjelang hari besar keagamaan. Harapannya hal ini dapat membantu dan menambah kebahagiaan masyarakat yang merayakannya. “Kegiatan baksos ini kita tujuikan untuk membantu sekaligus menambah keceriaan dan kebahagiaan para penerimanya dalam menyambut hari raya Idulfitri,” ujarnya.

Kegiatan baksos juga melibatkan Yayasan Lotus untuk membagikan kupon paket Lebaran kepada warga kurang mampu di Titipapan. Menurut Denny Muljono, Ketua Bidang Humas dan Organisasi Perbanas Sumut, Perbanas Sumut memberikan bingkisan berupa paket sembako dan angpao, sedangkan LCM Bankers memberikan kain sarung, kue, dan angpao. Terdapat 110 paket Lebaran yang dibagikan untuk mereka yang berhak menerimanya.

Penyerahan bingkisan Lebaran dihadiri oleh perwakilan dari Perbanas Sumut dan LCM Bankers, yakni Lie Cian, Joelina David, Ana Sjamsuriah, Jusri Buhali, M. Mustaqin, Tonny Indra Wijaya, Alexander Tan, dan Merry Chang (Koordinator Lapangan Yayasan Lotus). ■



Menebar Benih Ikan di Danau Toba

Pada 29 Juni 2019 Perbanas Sumatera Utara (Sumut) merealisasikan salah satu program *corporate social responsibility* (CSR)-nya yang terkait dengan kegiatan pelestarian alam dengan melepaskan 13.500 ekor bibit ikan di Danau Toba. Danau dengan panjang 100 kilometer (km) dan lebar 30 km ini terletak di Pantai Tandarabun, Desa Dosroba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumut. Selain berdampak pada kelestarian alam, kegiatan hasil kerja sama Perbanas Sumut, Lions Club Medan Bankers, dan Yayasan Budaya Hijau ini diharapkan meningkatkan perekonomian daerah, khususnya bidang perikanan.

Pelepasan bibit ikan dihadiri Thomas C. Kusuma, Ketua Perbanas Sumut dan Surya Jusuf, Ketua Yayasan Budaya Hijau Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Perbanas Sumut, yaitu Li Cian, Bendahara; Asima Sitompul, Wakil Sekretaris; Joelina David, Kepala Bagian (Kabag) Sosial; Denny Muljono, Kabag Humas; serta perwakilan anggota Perbanas Sumut, yaitu Susan, Ali, Jaibut Sijabat, Hartono, Pohan Djingga, Catherine Goei, Budi, Horas Hutabarat, dan Djoni.

“Benih ikan yang dilepas di Danau Toba diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar Danau Toba,” ungkap Thomas, yang juga *Charter President* Lions Club Medan Bankers. ■



Seminar "Hukum Kepailitan" Perbanas Jateng

Pada 7 Mei 2019 Perbanas Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan seminar dengan tema “Hukum Kepailitan”. Materi disampaikan oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., notaris dan ahli hukum. Seminar yang dihadiri praktisi perbankan di Semarang dan sekitarnya itu mendapatkan respons yang baik dari peserta. Dalam paparannya, Liliana menjelaskan hukum kepailitan dengan sangat detail. Diawali dengan sejarah dan latar belakang hukum kepailitan di Indonesia hingga proses hukum untuk memutuskan kasus pailit. ■





PERBANAS
INSTITUTE

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERBANAS INSTITUTE TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM REGULER

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Diploma Tiga (D3)

- Keuangan dan Perbankan
- Akuntansi Perpajakan

Strata Satu

- Manajemen
- Akuntansi
- Ekonomi Syariah

PERIODE PENDAFTARAN

NOVEMBER 2018-AGUSTUS 2019

Fakultas Teknologi Informasi

Strata Satu

- Teknik Komputer
- Sistem Informasi

PROGRAM EKSTENSI

Manajemen

Akuntansi

Ekonomi Syariah

Sistem Informasi

SEKOLAH PASCASARJANA

Magister Manajemen

Magister Akuntansi

Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)

Kampus Jakarta

Telp : (021) 5252533, 5222501-04
ext: 5104 & 5108
Faks : +62 21 5228460 & 5704376
Jl. Perbanas, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940

Kampus Bekasi

Telp : (021) 8224432, 8224178
8224383, 8224968
Faks : +62 21 8224432
Jl. Cut Meutia Raya No:2
Bekasi 17116